

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, dan diperbaharui kembali menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, program penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Tugas pokok tersebut kemudian diperinci lagi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian tugas dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, dimana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

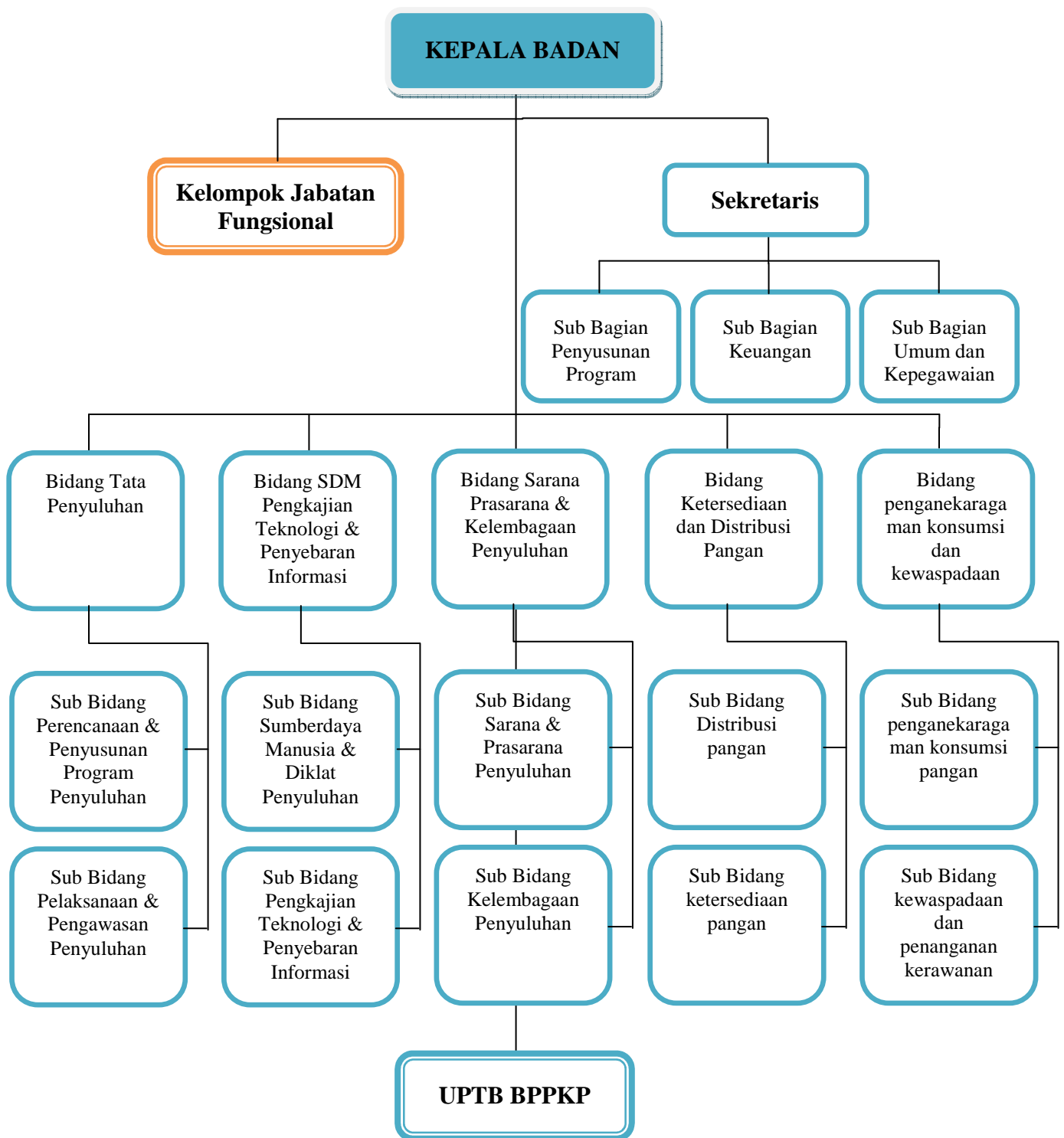
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dan program di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan propinsi dan nasional;
- b) Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah;
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Kelembagaan Teknis Daerah Kabupaten Siak. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari gambar tersebut terlihat, bahwa Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak memiliki 1 unit kerja eselon III A (sekretariat) yang membawahi 3 unit kerja eselon IV A, 4 unit kerja eselon III B (Bidang) masing-masing membawahi 2 unit eselon IV A, dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang merupakan unit kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB eselon IV A dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha UPTB, eselon IV B. Terdapat 7 (tujuh) UPTB, meliputi:

1. UPTB Bungaraya
2. UPTB Dayun
3. UPTB Sabak Auh
4. UPTB Kerinci Kanan
5. UPTB Pusako
6. UPTB Kandis
7. UPTB Sungai Mandau



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Perda No.15 Tahun 2012)

2.2 Sumber Daya

a. Kondisi Sumberdaya Manusia BPPKP Kabupaten Siak

Berdasarkan kondisi per bulan Desember tahun 2015, jumlah aparatur pembina penyelenggara penyuluhan dan ketahanan pangan yang bertugas di BPPKP Kabupaten Siak sebanyak 206 orang yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), tenaga honorer non-PNS serta THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) secara keseluruhan berjumlah 206 orang terdiri dari 88 orang PNS dan 118 orang tenaga honorer/THL-TBPP

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai BPPKP Kabupaten Siak Tahun 2015

No	Tempat Kerja	Status		Jabatan				Jumlah
		PNS	Honorer	kepala	staf teknis-adm	PPL	Petugas Keamanan /Tukang Kebun	
1	Kabupaten	35	18	1	52	0	0	53
2	UPTB Bungaraya	8	13	1	2	16	2	21
3	UPTB Sabak Auh	11	14	0	4	19	2	25
4	UPTB Pusako	5	15	1	4	13	2	20
5	UPTB Dayun	9	14	1	3	17	2	23
6	UPTB Kerinci Kanan	6	15	1	3	15	2	21
7	UPTB Kandis	7	10	1	2	12	2	17
8	UPTB Sungai Mandau	7	14	1	2	16	2	21
9	BPPUT	0	5	0	1	0	4	5
	Jumlah	88	118	7	73	108	18	206

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPKP tahun 2015

Dari tabel 2.1 dapat diklasifikasikan antara PNS dan tenaga honorer, PNS BPPKP sebanyak 43% dan 57% tenaga honorer. Komposisi jumlah Aparatur yang tidak seimbang antara PNS dan tenaga honorer akan menyebabkan kesulitan dalam penentuan serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan kelembagaan terutama BPPKP Kabupaten Siak.

Jumlah Tenaga PPL sebanyak 108 orang atau 52 % dari total jumlah pegawai yang ada di BPPKP yang mana jumlah tersebut belum ideal untuk menyelesaikan beban tugas terhadap 131 kampung binaan yang ada di kabupaten Siak.

Jumlah PNS berdasarkan golongan, pada Tabel 2.2 komposisi BPPKP didominasi oleh pegawai golongan III sebesar 71,5%, yang menandakan bahwa

rata-rata pendidikan dan atau pengalaman kerja umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja Tabel 2. Jumlah PNS BPPKP berdasarkan Golongan.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
IV	3	4	1	0	8
III	14	24	15	10	63
II	0	7	8	2	17
Jumlah					88

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPKP tahun 2015

Sedangkan pada Tabel 2.3 jumlah pegawai BPPKP yang berlatar belakang jenjang pendidikan sebagian besar pada jenjang pendidikan Strata-1 sebesar 61,4%.

Kondisi ini tentunya masih belum sesuai dengan tugas pokok BPPKP sebagai salah satu instansi pembuat kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang memerlukan tenaga berpendidikan dengan latar belakang teknis.

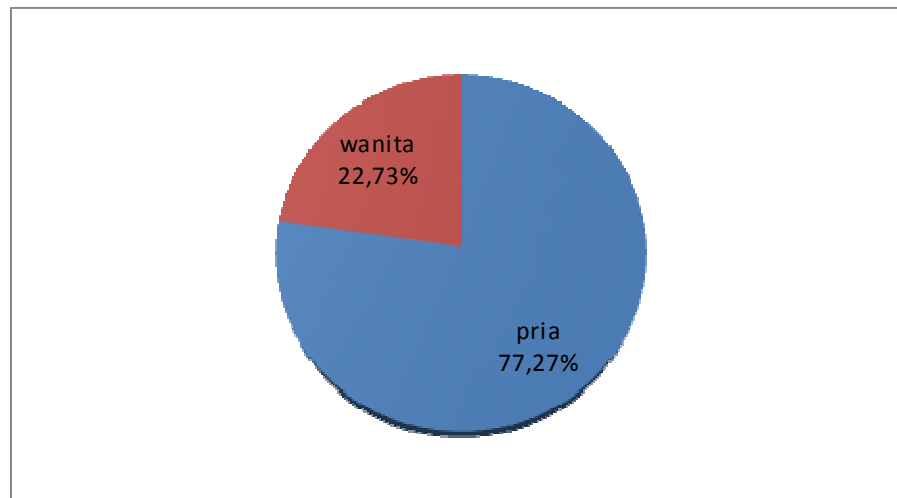
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian	Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-I	SLTA	SLTP	
1	Kabupaten	8	29	1	1	1	13	0	53
2	UPTB Bungaraya	0	16	0	1		4	0	21
3	UPTB Sabak Auh	0	11	3	5		6	0	25
4	UPTB Pusako	0	9	1	2		7	1	20
5	UPTB Dayun	0	14	0	4		5	0	23
6	UPTB Kerinci Kanan	0	18	0	0		3	0	21
7	UPTB Kandis	0	13	0	0		4	0	17
8	UPTB Sungai Mandau	0	14	2	0		5	0	21
9	BPPUT	0	1	0	0		1	3	5
	Jumlah	8	125	7	13	1	48	4	206

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPKP tahun 2015

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2015, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BK2KP) Kabupaten Siak adalah sebanyak 68 orang (77,27%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 20 orang (22,73%).

Dengan demikian jumlah pegawai wanita di BPPKP Kabupaten Siak telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.



Gambar 2.2. Jumlah Pegawai BPPKP berdasarkan jenis kelamin

b. Kondisi Sumberdaya Petugas Penyuluh Lapangan

Pada Tabel 2.4 berikut terlihat bahwa jumlah penyuluh per kecamatan di Kabupaten Siak dengan total 108 orang, terdiri dari 35 % PPL berstatus PNS, 41 % PPL berstatus Honorer dan 24 % berstatus THL/TB. Hal ini juga tidak menunjukkan keselarasan dalam penempatan satu penyuluh untuk satu kampung (WKPP) dimana kabupaten Siak memiliki 131 kampung.

Tabel 2.4. Jumlah PPL per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015

NO	KECAMATAN	STATUS			Jumlah
		HONORER	THL/TB	PNS	
1	SIAK	4	1	1	6
2	BUNGARAYA	1	4	5	10
3	MEMPUA	5	1	1	7
4	PUSAKO	2	3	1	6
5	DAYUN	4	3	2	9
6	KOTO GASIB	2	1	5	8
7	SABAK AUH	1	2	4	7
8	SUNGAI APIT	7	1	4	12
9	KERINCI KANAN	5	2	3	10
10	LUBUK DALAM	2	2	1	5
11	SUNGAI MANDAU	3	2	2	7
12	TUALANG	4	2	3	9
13	KANDIS	1	2	5	8
14	MINAS	3	0	1	4
	Jumlah	44	26	38	108

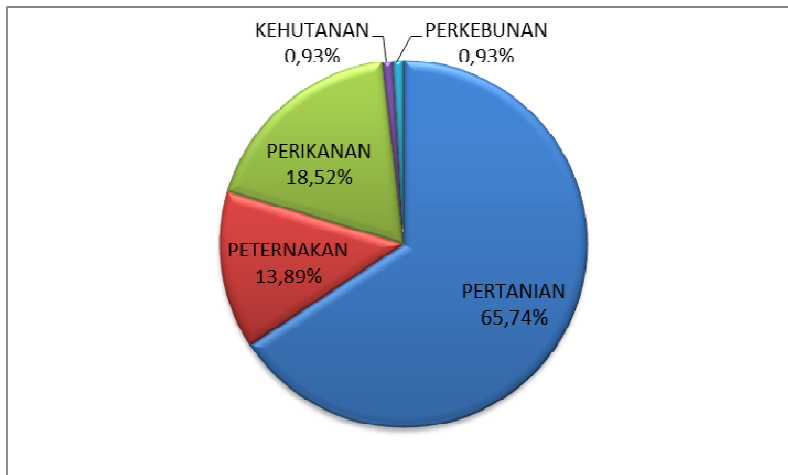
Sumber: Bidang Tata Penyuluhan BPPKP tahun 2015

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 menunjukkan persentase yang masih didominasi oleh penyuluh bidang pertanian, sedangkan bidang penyuluhan lain masih sedikit. Hal ini berpengaruh pada dukungan penyuluh terhadap kegiatan di lapangan dimana penyuluh dituntut polivalent terhadap semua permasalahan di lapangan.

Tabel 2.5. Jumlah PPL berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Disiplin Ilmu Tahun 2015

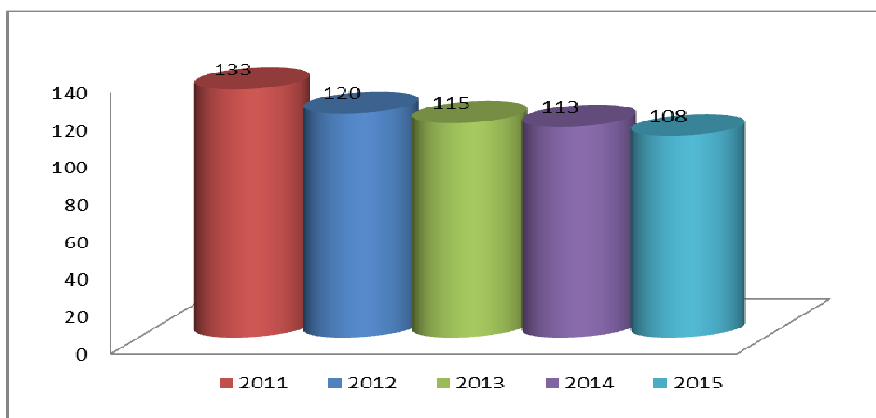
KECAMATAN	S-1					D-III		SLTA	Jumlah
	SP	SPt	Spi	Shut	Sbun	SP	SPt	SP	
SIAK	2	1	3	0	0	0	0	0	6
BUNGARAYA	7	1	0	0	0	1	0	1	10
MEMPUA	4	1	1	0	0	0	0	1	7
PUSAKO	1		1	0	0	2	0	2	6
DAYUN	2	3	0	0	1	1	1	1	9
KOTO GASIB	3	0	2	0	0	3	0	0	8
SABAK AUH	4	1	0	0	0	2	0	0	7
SUNGAI APIT	4	0	1	0	0	3	0	4	12
KERINCI KANAN	5	1	2	0	0	0	0	2	10
LUBUK DALAM	3	1	1	0	0	0	0	0	5
SUNGAI MANDAU	1	1	1	1	0	0	0	3	7
TUALANG	3	3	3	0	0	0	0	0	9
KANDIS	5	1	2	0	0	0	0	0	8
MINAS	1		3	0	0	0	0	0	4
Jumlah	45	14	20	1	1	12	1	14	108

Sumber: Bidang Tata Penyuluhan BPPKP tahun 2015



Gambar 2.3. Persentase Penyuluh Berdasarkan Bidang Penyuluhan Tahun 2015

Berikut rangkuman jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan selama periode (2011-2015) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan pada BPPKP selama Tahun 2011-2015

Terjadi penurunan jumlah tenaga PPL selama kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 18%, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas kelembagaan secara umum serta tugas penyuluhan pertanian secara khusus.

Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu ditunjang dengan pementapan kelembagaan penyuluhan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, serta sarana dan prasarana penyuluhan.

c. Kondisi Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Mengenai perlengkapan sarana dan prasarana pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, serta kantor UPTB dikecamatan secara umum dapat dikatakan telah memadai, karena sarana dan prasarananya yang ada saat ini sebagian besar merupakan pelimpahan dari Dinas Pertanian, dengan kondisi sebagian besar kurang memadai. Keadaan ini tentunya akan berpengaruh dalam target pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 7 tahun 2008 secara maksimal.

1. Gedung Kantor

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak masih menumpang, yang terletak di kompleks perkantoran Tanjung Agung Gedung Bappeda Lt.1, Siak Sri Indrapura. oleh karena itu, ada pertimbangan untuk pembuatan gedung sendiri.

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak memiliki kendaraan bermotor sebanyak 169, terdiri dari:

- Roda 4, sebanyak 11 unit;
- Roda 2, sebanyak 158 unit

Tabel 2.6. Kendaraan Bermotor pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak

Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk / Type	Tahun Perolehan	Kondisi Tahun 2015			Kondisi Tahun 2016			Jumlah s/d thn ini
				B	K	RB	B	K	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sepeda Motor (-)	Yamaha Sigma / Bebek	1999	-	-	1	-	-	-	1
2	Sepeda Motor (BM 3099 S)	YAMAHA / JUPITER	2001	1	-	-	-	-	-	1
3	Sepeda Motor (BM 3151 S)	YAMAHA /	2001	1	-	-	-	-	-	1
4	Sepeda Motor (BM 3201 S)	YAMAHA / RX - KING	2002	1	-	-	-	-	-	57
5	Sepeda Motor (BM 3226 S)	YAMAHA / RX - KING	2003	3	-	-	-	-	-	

Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk / Type	Tahun Perolehan	Kondisi Tahun 2015			Kondisi Tahun 2016			Jumlah s/d thn ini
				B	K	RB	B	K	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sepeda Motor (BM 3273 S)	YAMAHA / RX - KING	2004	5	-	-	-	-	-	
7	Sepeda Motor (BM 3329 S)	YAMAHA / RX - KING	2005	16	-	-	-	-	-	
8	Sepeda Motor (BM 3373 S)	YAMAHA / RX - KING	2006	2	-	-	-	-	-	
9	Sepeda Motor (BM 3530 S)	YAMAHA / RX - KING	2006	30	-	-	-	-	-	19
10	Sepeda Motor (BM 5155 S)	HONDA / SUPRA FIT	2006	19	-	-	-	-	-	
11	Sepeda Motor (BM 3359 S)	YAMAHA / YT 115	2006	12	-	-	-	-	-	
12	Sepeda Motor (BM 3387 S)	HONDA / SUPRA X 125	2006	12	-	-	-	-	-	12
13	Sepeda Motor (BM 5241 S)	HONDA / REVO	2007	2	-	-	-	-	-	2
14	Sepeda Motor (BM 5408 S)	HONDA / REVO	2010	10	-	-	-	-	-	10
15	Sepeda Motor (BM 3822 S)	KAWASAKI / AN112R	2011	43	-	-	-	-	-	43
16	Station Wagon (BM 1016 S)	Toyota /	2001	1	-	-	-	-	-	3
17	Station Wagon (BM 1457 S)	Toyota /	2002	1	-	-	-	-	-	
18	Station Wagon (BM 1013 S)	Toyota /	2010	1	-	-	-	-	-	
19	Station Wagon (BM 1307 S)	Toyota / Avanza	2010	1	-	-	-	-	-	1
20	Station Wagon (BM 1349 S)	Toyota / Rush	2011	1	-	-	-	-	-	4
21	Station Wagon (BM 1390 S)	Toyota / Rush	2012	1	-	-	-	-	-	
22	Station Wagon (BM 1141 S)	Toyota / Rush	2010	1	-	-	-	-	-	
23	Station Wagon (BM 1445 S)	Toyota / Rush	2013	1	-	-	-	-	-	
24	Station Wagon (BM 1255 S)	Toyota / Innova	2008	1	-	-	-	-	-	2
25	Station Wagon (BM 1389 S)	Toyota / Innova Luxury	2012	1	-	-	-	-	-	
26	Kendaraan Dinas Bermotor Lain- lain (BM 8226 S)	Toyota / Hilux/Pick Up	2013	1	-	-	-	-	-	1
	Total									169

3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BPPKP meliputi: Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini:

Tabel 2.7. Peralatan Elektronik dan Studio di BPPKP Kabupaten Siak

Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk /Type	Tahun Perolehan	Kondisi Tahun 2015			Kondisi Tahun 2016			Jumlah s/d thn ini
				B	K	RB	B	K	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Brand Kas	Uchida/B KK	2009	1	-	-	-	-	-	1
2	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	Sharp	2009	1	-	-	-	-	-	1
3	Stabilizer/Stavolt	StarVolt	2010	1	-	-	-	-	-	1
4	UPS	Lexus	2009	5	-	-	-	-	-	11
5	UPS	Prolink	2012	6	-	-	-	-	-	
6	Slide Projector	Toshiba	2009	1	-	-	-	-	-	1
7	Handycam	Sony	2009	1	-	-	-	-	-	2
8	Handycam	Panasonic	2010	1	-	-	-	-	-	
9	Wireless Amplifier	Weston	2009	1	-	-	-	-	-	1
10	Megaphone		2010	2	-	-	-	-	-	2
11	Camera Electronic	Sony	2009	1	-	-	-	-	-	5
12	Camera Electronic	Kodak	2010	3	-	-	-	-	-	
13	Camera Electronic	Canon EOS 60 D	2013	1	-	-	-	-	-	
14	Televisi	LG	2011	2	-	-	-	-	-	2
15	Lemari Es	Toshiba	2011	1	-	-	-	-	-	1
16	Genset	Firman	2011	1	-	-	-	-	-	1
17	Antena SHF/Parabola Portable		2012	1	-	-	-	-	-	1
18	Facsimile	Panasonic KX-FT981	2013	1	-	-	-	-	-	

d. Stakeholders

Hampir seluruh kegiatan BPPKP Kabupaten Siak di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta stakeholders pendukung, seperti: Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani),

Perum Bulog, dan Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, Koperasi Peternak, KUD/Koperasi dan sebagainya.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya:

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- Kelompok Lumbung Pangan;
- Kelompok Afinitas pada Desa Mandiri Pangan(Demapan);
- Tim Penggerak PKK;
- Taman Posyandu;
- Kelompok Dasa wisma;
- Kelompok Usaha Pangan Olahan

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya:

- Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Kelompok Wanita Tani;
- Kelompok Taruna Tani;
- Kelompok Peternakan;
- Kelompok Perikanan;

Tabel 2.8. Data Kelembagaan Petani dan Jumlah Anggotanya

No	Kecamatan	Kelas Potan Dewasa				Komoditi Unggulan				
		P	L	M	U	Jumlah Volume/Luas (Ha/Ekor)				
						TP	BUN	HOR	NAK	KAN
1	SABAK AUH	18	53	-	-	1.201	441	11	-	-
2	SUNGAI APIT	49	59	-	-	431	1635	349	207	628
3	PUSAKO	40	20	-	-	-	2871,07	75	11	1
4	MEMPURA	33	9	-	-	-	810	144	2	112
5	BUNGARAYA	30	55	12	-	2.180	1.314	3	-	1.243
6	SIK	36	19	-	-	0,65	1.120	37	131	13.004
7	DAYUN	129	146	12	-	-	11.991	-	-	-
8	KOTO GASIB	59	67	-	-	-	1.630	-	-	-
9	KERINCI KANAN	13	190	33	-	-	11.370	38	18.406	318.701
10	LUBUK DALAM	10	73	20	5	1	4.088	4	244	4
11	SUNGAI MANDAU	52	11	1	-	1.088	569	13	67	3
12	TUALANG	69	4	1	-	-	1.396	61	240	2.022
13	KANDIS	67	22	-	-	85	2.907	78	909	3.621
14	MINAS	53	21	-	-	15,05	2308,5	41,8	32,5	12,4
	JUMLAH TOTAL	658	749	79	5	5.001	44.450	854	20.249	339.351

Sumber : Sub Bidang Kabid Sarana Prasarana & Kelembagaan Penyuluhan BPPKP 2015

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat jumlah kelompok tani yang ada sekarang sebanyak 1.491 poktan dengan luas lahan yang diusahakan 409.955 Ha, yang mana sumbangan dari sektor tanaman pertanian hanya 1,2 %.

2.3 Kinerja Pelayanan BPPKP

Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Siak dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Namun, kini fokus dari kinerja BPPKP diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Siak termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN Nomor 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan suatu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang memegang kendali dan peranan penting dalam mewujudkan visi pembangunan dari sektor pertanian dalam rangka mempercepat pencapaian Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,

serta ketahanan pangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pangan.

Sesuai dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Siak juga mencerminkan bahwa titik berat pembangunan dalam periode 2016 – 2021 adalah berupa pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sumberdaya alam yang ada dengan lebih mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif di Kabupaten Siak.

Dilihat dari persentase tanaman pertanian yang diusahakan memang masih sangat jauh dari harapan mewujudkan swasembada pangan, ini merupakan tantangan yang harus dan segera diselesaikan, penanganan terhadap permasalahan tersebut perlu disinergiskan dengan seluruh penyelenggara terkait fungsi ketahanan pangan secara umum baik teknis maupun sistematis agar perwujudan percepatan swasembada pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan di kabupaten Siak cepat tercapai yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.9. Luas lahan menurut penggunaannya

NO	KECAMATAN	Tipe Lahan					
		Lahan Sawah (Ha)	Pekarangan (Ha)	Tegal/Kebun (Ha)	Ladang/ Huma (Ha)	Padang Rumput (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MINAS	-	320	470	17	-	-
2	KANDIS	82	19	360	139	31	474
3	SIK	-	2098	3.267	80	37	46770
4	SUNGAI APIT	449	1.355	732	20	5	36.232
5	SUNGAI MANDAU	606	1.465	14.710	6.685	29	11.385
6	KERINCI KANAN	-	544	17	-	4	300
7	LUBUK DALAM	-	715	6	-	4	950
8	TUALANG	11	50	55	16	41	50
9	KOTO GASIB	-	3.561	1.375	1158	20	2.500
10	DAYUN	-	265	256	199	-	2.050
11	BUNGA RAYA	2.354	2.940	228	30	-	527
12	MEMPURA	-	4.955	5.850	1.906	-	2385
13	SABAK AUH	1.659	250	34	200	12	1600
14	PUSAKO	32	179	2.500	-	29	1003
JUMLAH		5.193	18.716	29.860	10.450	183	106.226

Sumber: Sub Bidang Sumberdaya Manusia BPPKP 2012

Tabel 2.9 di atas memberikan gambaran yang jelas tentang masih memungkinkannya pengembangan potensi dan pemanfaatan areal produktif bagi usaha pertanian tanaman pangan secara umum sebagai wujud dari keseriusan dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan di kabupaten Siak khususnya dan provinsi Riau Umumnya.

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Sesuai Kewenangan Kab/Kota

Indikator	Persentase Capaian					Target Nasional 2015
	2011	2012	2013	2014	2015	
Penguatan Cadangan Pangan	0	0	0	0	0	60
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	0	0	0	0	0	100
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	0	0	0	0	0	60
Penanganan Daerah Rawan Pangan	0	0	0	0	0	80

B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Pelayanan Badan Ketahanan Pangan 2011–2016 mendapat dukungan pendanaan dari APBD. Realisasi anggaran yang digunakan disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%)				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan			v	133	133	133	133	133	120	119	114	113	120	90,23%	89,47%	85,71%	84,96%	90,23%
Jumlah tingkatan kelas kelompok tani yang ditingkatkan			v	900	1000	1100	1200	1300	1253	1372	1419	1491	1542	139,22%	137,20%	129,00%	124,25%	118,62%
Persentase penerapan teknologi pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan			v	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	0,00%	81,13%	86,41%	46,02%	57,28%	0,00%	202,83%	192,02%	92,04%	104,15%
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Beras			v	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,95%	42,00%	46,57%	53,10%	46,02%	57,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,58%
Persentase Ketersediaan Pangan Palawija			v	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	139,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	143,24%
Persentase Ketersediaan Pangan Buah-buahan			v	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	169,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	194,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	114,94%
Persentase Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran			v	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	151,95%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan norma pola pangan harapan nasional	v			0	0	0	70	70	0	0	0	70,70	73,30	0,00%	0,00%	0,00%	101,00%	104,71%

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak

Anggaran	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA DAERAH	20.178.013.990	19.658.490.667	19.862.079.577	15.904.505.797	13.388.730.740	16.845.035.611	16.638.804.131	16.174.685.330	14.074.830.113	11.278.145.347	83,48%	84,64%	81,44%	88,50%	84,24%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.278.062.514	8.809.078.827	8.918.993.600	8.623.301.797	8.814.412.240	8.340.161.498	7.708.961.677	7.530.135.748	7.912.082.847	7.820.280.649	89,89%	87,51%	84,43%	91,75%	88,72%
BELANJA LANGSUNG	10.899.951.476	10.849.411.840	10.943.085.977	7.281.204.000	4.574.318.500	8.504.874.113	8.929.842.454	8.644.549.582	6.162.747.266	3.457.864.698	78,03%	82,31%	79,00%	84,64%	75,59%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.586.225.500	4.692.301.500	4.719.459.000	4.372.521.000	3.267.050.000	3.584.555.700	3.707.652.763	3.717.085.099	3.745.948.588	2.692.657.550	78,16%	79,02%	78,76%	85,67%	82,42%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.871.514.976	2.325.660.360	995.416.977	534.507.000	235.152.000	2.433.441.488	2.079.039.741	903.686.107	494.952.978	169.701.648	84,74%	89,40%	90,78%	92,60%	72,17%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	85.850.000	134.750.000	-	-	-	85.135.625	116.907.960	-	-	-	99,17%	86,76%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	770.612.000	280.100.000	589.055.000	82.061.000	43.532.500	643.735.800	204.424.000	448.541.150	68.512.100	25.082.500	83,54%	72,98%	76,15%	83,49%	57,62%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	38.900.000	38.900.000	31.500.000	31.500.000	-	35.044.000	38.580.000	30.860.000	31.020.000	-	90,09%	99,18%	97,97%	98,48%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	302.000.000	811.740.980	1.666.384.500	601.242.000	288.628.000	277.763.600	519.918.340	1.339.462.727	490.114.600	193.670.000	91,97%	64,05%	80,38%	81,52%	67,10%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.824.634.000	1.819.063.000	2.081.249.500	1.309.196.000	487.361.000	1.061.644.300	1.404.549.950	1.492.017.699	1.038.323.600	164.473.000	58,18%	77,21%	71,69%	79,31%	33,75%
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	420.215.000	746.896.000	729.111.000	350.177.000	252.595.000	383.553.600	636.641.800	599.781.800	293.875.400	212.280.000	91,28%	85,24%	82,26%	83,92%	84,04%
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN	-	-	130.910.000	-	-	-	-	113.115.000	-	-	0,00%	0,00%	86,41%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	-	273.790.001	-	-	-	-	222.127.900	-	-	-	0,00%	81,13%	0,00%	0,00%	0,00%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKP

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pangan merupakan komoditas strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi hak azasi dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Secara umum pembangunan di bidang pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan karena ketahanan pangan sebagai kunci utama menuju kedaulatan pangan yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Bahwa ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari sisi jumlah, mutu, keamanan, merata dan terjangkau.

Kabupaten Siak yang memiliki Luas 855,09 Ha dengan jumlah penduduk 471.330 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan produksi pangan terutama beras masih mengalami kekurangan sebesar 43.9 % setara 25.647 ton beras. Hal ini disebabkan karena peningkatan kebutuhan pangan yang lebih besar dibandingkan laju peningkatan produksi.

a. Peluang (Opportunity) bagi pengembangan pelayanan SKPD, adalah:

1. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
2. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat kecamatan;
4. Adanya advokasi penumbuhan pos penyuluhan di setiap desa/kelurahan;
5. Adanya political will terhadap tupoksi institusi, baik secara nasional maupun regional;



6. Tersedianya tenaga penyuluh lapangan dikecamatan ;
7. Adanya kebijakan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Semakin meningkatnya tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap pendampingan program pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan serta kehutanan dan ketahanan pangan;
9. Adanya teknologi yang selalu berkembang;
10. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan;
11. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik, makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap aneka produk pangan olahan yang sehat, aman, bergizi, dan berkualitas;
12. Potensi diversifikasi bahan pangan lokal.

b. Tantangan (Threat) bagi pengembangan pelayanan SKPD, adalah:

1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi;
2. Berlangsungnya perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
3. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha;
4. Fluktuasi harga pangan;
5. Menurunnya kinerja sumber daya manusia penyuluh sebagai dampak dari menurunnya kualitas dan kuantitas penyuluh;
6. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif;
7. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber pengganti pangan utama padi, jagung, dan kedele;
8. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.

